

REVISI I RENCANA AKSI ATAS REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)	KEGIATAN (6)	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran (19)	Penanggung Jawab (21)
						Bulan-1 (7)	Bulan-2 (8)	Bulan-3 (9)	Bulan-4 (10)	Bulan-5 (11)	Bulan-6 (12)	Bulan-7 (13)	Bulan-8 (14)	Bulan-9 (15)	Bulan-10 (16)	Bulan-11 (17)	Bulan-12 (18)		
1.	SK2 Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 2.1 Jumlah Layanan Subsidi Transportasi Angkutan Jalan	Trayek	4	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	0	0	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Rp4.289.575.000	- Seksi Sarana AJSDP - Seksi Lalu Lintas JSDPP
2.	SK 3 Meningkatkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.1 Monitoring dan Evaluasi Layanan AKAP terhadap Terminal Tipe A	Kegiatan	7	1. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; dan 2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Rp907.170.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 3.2 Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	7	Pengoperasian 7 (tujuh) Terminal Penumpang Tipe A	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Rp12.675.973.000	- Seksi Prasarana JSDP
3.	SK 5 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 5 Jumlah Pelabuhan Penyeberangan yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	Pengoperasian 3 (tiga) Pelabuhan Penyeberangan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Rp1.276.116.000	- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 6 Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Trayek	1	Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional)	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	Rp3.628.283.000	- Seksi Sarana AJSDP
4.	SK 6 Meningkatkan rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan sungai dan danau	IKK 7 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	3	Pembangunan Pelabuhan Sungai Lanjutan (Prioritas Nasional)	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	Rp26.279.820.000	- Seksi Prasarana JSDP
5.	SK 7 Meningkatkan pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 7.2 Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	7	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Rp214.000.000	- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 7.4 Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	Rp114.830.000	- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 7.5 Monitoring Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas dan Pokok	Kegiatan	6	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan;	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Rp714.270.000	- Seksi Sarana AJSDP
					2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan;	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Rp92.400.000	- Seksi Sarana AJSDP
					3. Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana;	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Rp806.670.000	- Seksi Prasarana JSDP
					4. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas;	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Rp403.335.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
					5. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas; dan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Rp503.835.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
					6. Pengelolaan Bidang Ketatausahaan.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp2.711.180.000	- Subbag Tata Usaha
6.	SK 8 Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 7.6 Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Event Khusus	Kegiatan	2	1. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Lebaran; dan 2. Monitoring dan Pengawasan Angkutan Natal dan Tahun Baru	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	Rp60.000.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 8.2 Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	3	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	Rp237.000.000	- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 8.4 Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Unit	1	Monitoring Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1		- Seksi Prasarana JSDP
		IKK 8.5 Operasional layanan Kapal Kerja sesuai SPM	Unit	1	Operasional dan Pemeliharaan Tug Boat dan Kapal Patroli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp2.669.021.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 8.6 Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1	Pemeliharaan Local Port Service (LPS)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp250.000.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP

REVISI I RENCANA AKSI ATAS REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)	KEGIATAN (6)	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran (19)	Penanggung Jawab (21)
						Bulan-1 (7)	Bulan-2 (8)	Bulan-3 (9)	Bulan-4 (10)	Bulan-5 (11)	Bulan-6 (12)	Bulan-7 (13)	Bulan-8 (14)	Bulan-9 (15)	Bulan-10 (16)	Bulan-11 (17)	Bulan-12 (18)		
7.	SK 9 Meningkatkan Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.1 Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	7	1. Monitoring Pengelolaan Lalu Lintas; dan 2. Monitoring Pengendalian Lalu Lintas.	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Rp907.170.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 9.2 Jumlah kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	3	Pengoperasian 3 (tiga) UPPKB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Rp45.000.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 9.3 Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung Keselamatan	Unit	3	1. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan (UPPKB); dan 2. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua.	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	Rp3.241.457.000	- Seksi Prasarana JSDP
8.	SK 10 Meningkatkan kepatuhan 1) kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 10.1 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; dan 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp806.670.000	- Seksi Sarana AJSDP
		IKK 10.2 Jumlah kegiatan terkait kalibrasi alat uji berkala di daerah	Kegiatan	12	1. Monitoring Pengelolaan Sarana dan Angkutan; 2. Monitoring Pengendalian Sarana dan Angkutan; 3. Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Pengkalibrasian Alat Kalibrasi Kendaraan Bermotor; dan 4. Perawatan dan Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor Non Statis.	0	0	0	0	2	0	1	3	1	0	2	3	Rp1.136.670.000	- Seksi Sarana AJSDP
9.	SK 11 Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 11.1 Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Unit	5.967	1. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional; 2. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional; dan 3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.	0	1000	2500	4913	4913	4913	4913	5413	5967	5967	5967	5967	Rp18.491.975.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
		IKK 11.2 Jumlah Lokasi LRK yang dilakukan intervensi penanganan sesuai pedoman	Lokasi	4	Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) (Prioritas Nasional)	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rp1.694.025.000	- Seksi Lalu Lintas JSDPP
10.	SK 12 Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan	IKK 12.1 Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	150	Penyelenggaraan Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	Rp250.000.000	- Seksi Sarana AJSDP
		IKK 12.2 Pelaksanaan pengajaran keselamatan LLAJ anak usia dini oleh anak, guru atau pendamping sesuai pedoman pada lokasi yang berbeda	Orang	180	Penyelenggaraan Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) (Prioritas Nasional)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	Rp107.143.000	- Seksi Sarana AJSDP

REVISI I RENCANA AKSI ATAS REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (3)	SATUAN (4)	TARGET (5)	KEGIATAN (6)	RENCANA PELAKSANAAN												Anggaran (19)	Penanggung Jawab (21)
						Bulan-1 (7)	Bulan-2 (8)	Bulan-3 (9)	Bulan-4 (10)	Bulan-5 (11)	Bulan-6 (12)	Bulan-7 (13)	Bulan-8 (14)	Bulan-9 (15)	Bulan-10 (16)	Bulan-11 (17)	Bulan-12 (18)		
11.	SK 4 Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	Rp2.711.180.000	- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.2 Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	1	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.3 Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kementerian Perhubungan	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2		- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.4 Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3		- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.5 Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2		- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.6 Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.7 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	5	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5		- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.8 Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Kegiatan	2	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.9 Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	1	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	0	0	0	0	s	0	0	0	0	0	0	1		- Subbag Tata Usaha
		IKK 4.10 Kegiatan Pengembangan SDM Unit Kerja	Kegiatan	9	Pengelolaan Bidang Ketatausahaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	7		- Subbag Tata Usaha

Palembang, 19 Juni 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Sumatera Selatan



Ditandatangani secara elektronik
NURHADI UNGGUL WIBOWO, ST, MT
NIP. 19711116 199803 1 002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.